



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NANDI
2. Jabatan : DIREKTUR DIREKTORAT URUSAN INTERNASIONAL
3. NHK : 873864

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.050.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/150 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/33 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/220 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 380.000.000

1. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERTAHAP Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 100.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.530.000.000



III. HUTANG

Rp. 150.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.380.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.